

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2008.

Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1989.

Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 1986.

-----, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1993.

-----, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995.

-----, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.

-----, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.

Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 1997.

-----, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta:  
Raja Grafindo Persada, 2001.

-----, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta:  
Raja Grafindo Persada, 2005.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada, 2011.

-----, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Rajawali Pers,  
2011.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

-----, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.

Kartiwa, *Parlemen dan Kedaulatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Marbun, S.F, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*,  
Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muchsan, *Hukum Administrtasi negara dan Peradilan Administrasi di  
Indonesia* , Yogyakarta: Liberty, 1981.

Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai  
Pustaka, 1976.

Prodjohamidjojo, Mr. Martiman, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Saputra, Nata, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali, 1988.

Sibuea, Hotma P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: PT Penerbit Erlangga, 2010.

Sinaga, Dahlan, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2015.

Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Sumardjono, Maria S. W, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2006.

Soedibyo, Victor S, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Soetami, A. Siti, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

-----, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung:

PT. Refika Aditama, 2009.

Syarief, Elza, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, Jakarta:

Gramedia, 2014.

Tjandra, W. Riawan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*,

Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005.

Utsman, Sabian, *Menuju Penegakkan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2008.

Wiyono, R, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar

Grafika, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara.

Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara.

